



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 114 /KPTS/II /2025

TENTANG

**PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2025-2029**

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 64);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Ditigal Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU meliputi:

- a. peta rencana tata kelola;
- b. peta rencana manajemen;
- c. peta rencana layanan;
- d. peta rencana infrastruktur;
- e. peta rencana aplikasi;
- f. peta rencana keamanan; dan
- g. peta rencana audit teknologi informasi dan komunikasi.

KETIGA : Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan percepatan integrasi tata kelola, manajemen, layanan, infrastruktur, aplikasi, keamanan dan audit teknologi informasi dan komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 3 Februari 2025

BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 114 / KPTS / II / 2025
TANGGAL : 3 FEBRUARI 2025

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau lebih dikenal dengan transformasi digital menjadi kebutuhan pada setiap sektor, termasuk sektor pelayanan pemerintahan, yang pada akhirnya membawa dampak signifikan bagi kemajuan sebuah negara, khusus pemerintah daerah. Pemanfaatan TIK merupakan alat pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan layanan maupun dalam pengambilan keputusan strategis. Dalam rangka mewujudkan kinerja pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, akuntabel serta berkualitas dan terpercaya, ditopang dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2028 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kehadiran regulasi tersebut berdampak positif dalam lingkungan kerja maupun pemerintahan.

Sebagaimana visi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang mengusung visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", yang ditopang pada 8 misi atau Asta Cita dan program prioritas. Salah satu fokus Asta Cita menitikberatkan pada percepatan digitalisasi di Indonesia, guna mewujudkan pemerintahan yang transparan, inklusif dan efisien. Diperkuat dengan visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis yakni Mewujudkan Kabupaten Bengkalis Bermartabat, Maju dan Sejahtera serta Unggul di Indonesia dengan ditopang misi kedua yakni Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter, selaras pada strategi, poin pertama yakni pengembangan inovasi daerah dan penggunaan teknologi Informasi dalam meningkatkan pelayanan publik.

Sejalan dengan hal itu, penyelenggaraan SPBE di jajaran Pemerintah Kabupaten Bengkalis masih menjadi prioritas utama mendorong dan merealisasikan pemerintahan yang transparan, partisipatif, inovatif serta akuntabel, peningkatan kualitas dan kuantitas jangkauan layanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan SPBE, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis diatur dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Payung hukum tersebut sebagai instrument hukum guna mendorong percepatan Penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE di Kabupaten Bengkalis sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam pengembangan SPBE yang terintegrasi, mengurangi resiko kegagalan proyek akibat pencapaian sasaran yang kurang terarah dan memberikan kendali pengembangan SPBE sehingga solusi parsial yang tidak sinergis dapat dihindari, memberikan

solusi dalam pengintegrasian sistem guna menghindari duplikasi data dan ketidaktepatan data.

Salah satu kewajiban Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam penyelenggaraan SPBE, adalah menyusun dan menetapkan Peta Rencana SPBE Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2029, mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah yang terintegrasi. Kehadiran Peta Rencana SPBE ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan rencana dan anggaran tahunan SPBE. Peta Rencana SPBE daerah, yang mengacu pada dasar Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah memuat aspek Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2029 memberikan landasan berpikir, standarisasi, pentahapan, dan implementasi bagi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang komprehensif, efisien, efektif, dan terpadu dalam bentuk:

1. Kerangka Pemikiran Dasar (SPBE Framework);
2. Solusi Pentahapan Pengembangan (SPBE Roadmap);
3. Rencana proyek implementasi 5 (lima) tahun (SPBE *Implementation plan*) sesuai dengan sisa masa RPJMD.

1.2.2. Tujuan

Tujuan dari Peta Rencana SPBE Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. mendorong terwujudnya penyelenggaraan SPBE yang terarah, sistematis, terpadu, dan berkesinambungan;
2. membangun sinergi penyelenggaraan SPBE;
3. mewujudkan sinkronisasi dan integrasi penyelenggaraan SPBE; dan
4. meningkatkan kualitas layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan.

BAB II KONDISI SAAT INI

Penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari Capaian Indeks SPBE selama tiga tahun ini, yakni dari tahun 2022-2024, menunjukkan Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Bengkalis selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi. Penilaian indeks SPBE pada tahun 2020-2024 menggunakan instrumen penilaian yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Secara rinci dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

	2022	2023	2024
Indeks SPBE	2,21	2,70	2,79
Domain Kebijakan SPBE	1,60	2,80	2,80
Kebijakan Internal SPBE	1,60	2,80	2,80
Domain Tata Kelola SPBE	1,60	1,80	1,70
Perencanaan Strategis SPBE	1,75	1,75	1,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,75	1,50	1,50
Penyelenggara SPBE	1,00	2,50	2,20
Domain Manajemen SPBE	1,45	1,64	1,64
Penerapan Manajemen SPBE	1,63	1,63	1,63
Audit TIK	1,00	1,67	1,67
Domain Layanan SPBE	2,99	3,54	3,81
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,10	3,90	3,90
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,83	3,00	3,67

Sementara itu gambaran kondisi pada masing-masing muatan yang digunakan untuk menyusun rencana penyelenggaraan SPBE dalam Peta Rencana SPBE Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029, meliputi:

1. Tata Kelola SPBE

Pemerintah Kabupaten Bengkalis Barat sudah memiliki kebijakan internal terkait Tata Kelola SPBE berupa Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai dasar hukum pengaturan penerapan terkait pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan didalam kebijakan tersebut juga telah mengatur norma pengaturan penerapan SPBE pada Pemerintah kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi SPBE tahun 2023, penerapan Tata Kelola SPBE di Kabupaten Bengkalis masih belum memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait pelaksanaan SPBE secara terperinci yang meliputi aspek perencanaan strategis yang meliputi Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Rencana dan Anggaran SPBE, serta Inovasi Proses Bisnis. Makanya penyusunan dokumen peta rencana SPBE ini menjadi salah satu upaya penguatan tata kelola SPBE. Sementara itu dalam penyelenggaraan SPBE, sejak tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah memiliki tim koordinasi SPBE yang namun masih perlu adanya penguatan kolaborasi dan sinergi program dalam rangka penyelenggaraan SPBE.

2. Manajemen SPBE

Penyelenggaran Manajemen adalah serangkaian proses yang meliputi manajemen resiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan. Sejauh ini, penerapan Manajemen SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis masih bersifat mengatur secara internal unit pengelola TIK. Tak hanya itu, masih terdapat kekurangan yang penerapan manajemen SPBE, sehingga perlu penerapan manajemen SPBE perlu dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh Perangkat Daerah guna mengakomodasi arah kolaborasi. Adapun kekurangan tersebut meliputi :

- a. belum optimal pengelolaan keamanan informasi;
- b. kurangnya pengelolaan risiko SPBE;
- c. minimnya SDM TIK dan masih honorer;
- d. belum terkelolanya layanan layanan SPBE;
- e. belum optimalnya pengelolaan data, kurang terkelolanya aset TIK; dan,
- f. belum terkelolanya diseminasi pengetahuan SPBE.

3. Layanan SPBE

Sejauh ini Kabupaten Bengkalis sudah menerapkan layanan SPBE terdiri dari layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik, secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) - Untuk administrasi kepegawaian negeri	LAPORI - Aplikasi pengaduan masyarakat yang terhubung dengan seluruh kementerian dan lembaga
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) mencakup informasi seputar pembangunan daerah, keuangan daerah, serta informasi pemerintahan daerah lainnya. Tujuannya adalah menyatukan semua aspek tersebut dalam satu sistem yang terintegrasi	SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) - Portal pengadaan barang dan jasa pemerintah

secara keseluruhan.	
Srikandi adalah aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang digunakan untuk mengelola arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.	e-KTP Online - Aplikasi untuk mengurus KTP elektronik secara online
	SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) - Untuk pengelolaan data kependudukan
	SIPBukas (Sistem Informasi Pajak Bengkalis Secara Tuntas)
	Si SUKMA adalah aplikasi survei elektronik yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.

Dari tabel di atas, menunjukan bahwa layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan di Pemerintah Kabupaten Bengkalis memadai. Melalui upaya yang berkesinambungan, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan demi kesejahteraan masyarakat. Inisiatif ini tidak hanya menciptakan pemerintahan yang lebih baik, tetapi juga mendukung terciptanya masyarakat yang lebih informatif dan terlibat aktif dalam pembangunan daerah.

4. Aplikasi SPBE

Saat ini jumlah aplikasi SPBE yang diselenggarakan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebanyak 151 aplikasi, yang terdiri dari aplikasi umum. Dari jumlah aplikasi yang ada, ternyata belum terintegrasi atau interoperabilitas yang menghubungkan aplikasi berbasis data untuk menciptakan keterpaduan informasi. Namun untuk tindaklanjut agar kedepan terintegrasi, Tim TIK Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis tengah membangun aplikasi super apps.

5. Infrastruktur

Pada pertengahan tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bengkalis mulai mengelola jaringan internet satu pintu yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Jaringan ini menghubungkan seluruh 36 Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di Pulau Bengkalis, Pulau Rupat, Pesisir Sumatera dan Daratan Sumatera. Mulai tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan melaksanakan sistem internet satu pintu ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan dalam berurusan dengan berbagai layanan pemerintahan.

Untuk memberikan kemudahana layanan internet yang mudah diakses masyarakat, sejak tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menyediakan layanan wi-fi gratis di fasilitas umum, yakni di taman kota,

pelabuhan ro-ro Air Putih, Bengkalis dan Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu, serta Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Selain itu, fasilitas internet gratis pada sekolah sebanyak 70 titik yang tersebar di kecamatan, yang dibangun dari program BAKTI AKSI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Akses Internet). Kementerian Kominfo (Komdigi). BAKTI AKSI merupakan program penyediaan layanan internet menggunakan teknologi fiber optic, radio link dan VSAT.

Di penghujung tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga membangun Pusat Call Center 112 yang disebut dengan Panggilan Darurat Bengkalis Siaga 112. Posko pelayanan panggilan darurat ini berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bengkalis.

6. Keamanan SPBE

Sebagai upaya meningkatkan pelayanan informasi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis telah melakukan *self assessment indeks* terhadap aplikasi maupun website yang dikelola beberapa Perangkat Daerah, yaitu sebagaimana tabel di bawah ini:

1	Bengkaliskab.go.id	Diskominfotik
2	Satu Data Bengkalis	Diskominfotik
3	Simple (sistem pelayanan Kelurahan/ Kota)	Kecamatan
4	Siyap Bermasa	Dinas Sosial
5	Sicakeb	Bagian Organisasi

7. Audit TIK

Pelaksanaan audit TIK dalam penyelenggaraan SPBE sangat penting, sebagai kontrol dan pengawasan dalam mewujudkan digital government yang partisipatif, kolaboratif, berkelanjutan serta efektif, serta menciptakan keterpaduan dan terintegrasi sistem yang dibangun. Kemudian untuk menciptakan manajemen data dan pengelolaan sistem yang baik, menciptakan pengadaan sistem elektronik yang efisien hingga menciptakan kompetensi SDM yang memadai. Adapun dalam proses perencanaan/persiapan, auditor menentukan ruang lingkup audit dan menyusun audit, melakukan penyusunan tim auditor dan auditee, membuat persetujuan dan finalisasi audit plan, mengumpulkan kriteria teknis dan peraturan perundang-undangan serta mengumpulkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.

Meskipun demikian dalam penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Bengkalis selama ini belum dilakukan audit TIK SPBE, karena alasan sebagai berikut:

- a. belum tersedianya SDM auditor TIK SPBE yang kompeten
- b. belum dianggarkan pelaksana audit TIK SPBE
- c. kurangnya Pemahaman tentang Pentingnya Audit

BAB III

PETA RENCANA SPBE

Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Bengkalis disusun bertujuan memberikan panduan arah dan langkah dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE di Perangkat Daerah. Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Bengkalis disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selaras dengan misi kedua yakni Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter, selaras pada strategi, poin pertama yakni Misi tersebut menitikberatkan pada Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter.

Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Bengkalis berpedoman pada peta rencana SPBE nasional, arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Bengkalis, RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2029, dilakukan review pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Review Peta Rencana SPBE Kabupaten Bengkalis dilakukan berdasarkan:

- a. Perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
- b. Perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- c. Perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis;
- d. Perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis; atau
- e. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

Peta rencana SPBE Kabupaten Bengkalis memuat tentang rincian perencanaan strategis penyelenggaraan SPBE tahun 2025-2029, sebagaimana tabel di berikut ini:

Tabel Peta Rencana SPBE Kabupaten Bengkulu

No	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab	Realisasi 2024	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Meningkatkan Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik								
	Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,00	3,3	3,5	3,7	3,9	4,2
INISIATIF STRATEGIS								
	A	Penguatan Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE						
		1) Penyusunan kebijakan, regulasi dan prosedur kerja implementasi SPBE						
		- Pedoman Manajemen SPBE	✓	X	X	X	X	X
		- Pedoman dan Standar teknis pembangunan dan pengembangan aplikasi	✓	X	X	X	X	X
	Penatalaksanaan dan pengawasan e-Government	- Standar Teknis dan SOP Layanan Pusat Data	✓	X	X	X	X	X
		- Standar Teknis dan SOP Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu	✓	X	X	X	X	X
		- Standar teknis dan SOP Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	✓	X	X	X	X	X
		- Pedoman dan standar teknis Audit TIK	✓	X	X	X	X	X

			- Standar Belanja SPBE			√	X	X	X	X	X	X
		2)	Pengesahan kebijakan, regulasi dan prosedur kerja implementasi SPBE	Bagian Hukum			√	X	X	X	X	X
		3)	Reviu dan Penguatan Kebijakan Internal SPBE	Tim Koordinasi SPBE								
			- Reviu Pedoman Manajemen SPBE				√	X	√	X	√	√
B	Penyusunan Arsitektur SPBE											
		1)	Diseminasi Penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Diskominfotik			√	X	X	X	X	X
		2)	Konsinyering Penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Perangkat Daerah			√	X	X	X	X	X
		3)	Dokumentasi Kondisi Eksisting Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Bengkalis				√	X	X	X	X	X
		4)	Pengesahan Arsitektur SPBE Kabupaten Bengkalis	Sekretaris Daerah			√	X	X	X	X	X
		5)	Reviu dan Evaluasi Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Tim Koordinasi SPBE			X	√	√	√	√	√
C	Penyusunan Peta Rencana SPBE											
		1)	Kajian Kesenjangan dan Perumusan Peta Rencana SPBE Kabupaten Bengkalis	Perangkat Daerah			√	X	X	X	X	X
		2)	Konsinyering Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Bengkalis				√	X	X	X	X	X
		3)	Pengesahan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Sekretaris Daerah			√	X	X	X	X	X
		4)	Reviu dan Evaluasi Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Tim Koordinasi SPBE			√	X	X	X	X	X

Perencanaan dan Penganggaran SPBE										
D										
	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1)	Koordinasi internal rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis	Tim Koordinasi SPBE dan Tim TAPD		✓	✓	✓	✓	✓
		2)	Penyusunan dan penetapan tata kelola rencana dan anggaran SPBE	Tim Koordinasi SPBE dan Tim TAPD		✓	X	X	X	X
		3)	Penerapan rencana dan anggaran SPBE yang terpadu dan terkendali pada unit yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran dan dikonsultasikan pada unit pengelola TIK	Perangkat Daerah		✓	✓	✓	✓	✓
		4)	Reviu dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran SPBE Kabupaten Bengkalis	Tim Koordinasi SPBE		✓	✓	✓	✓	✓
		5)	Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran SPBE Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Perangkat Daerah		✓	✓	✓	✓	✓
E	Inovasi Proses Bisnis									
	Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	1)	Sinkronisasi Proses Bisnis	Perangkat Daerah		✓	✓	✓	✓	✓
		2)	Perbaikan Proses Bisnis sebagai bentuk penerapan inovasi proses bisnis			✓	✓	✓	✓	✓
		3)	Inovasi Proses Bisnis melalui Sistem Elektronik	Diskominfofik dan Bagian Organisasi		✓	✓	✓	✓	✓
		4)	Reviu dan Evaluasi Inovasi Proses Bisnis	Bagian Organisasi		✓	✓	✓	✓	✓
		5)	Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi Inovasi Proses Bisnis	Perangkat Daerah		✓	✓	✓	✓	✓

Penguatan Kolaborasi Tim Koordinasi SPBE											
F			1)	Penyusunan Rencana Koordinasi SPBE	Kerja Tim	Tim Koordinasi SPBE					
			2)	Forum Kolaborasi dan Sinergi SPBE			✓	✓	✓		
		Penatalaksanaan dan pengawasan e-Government	3)	Reviu dan Evaluasi Program Kerja Tim Koordinasi SPBE		✓	✓	✓	✓		
			4)	Reviu SK Tim Koordinasi SPBE		✓	✓	✓	✓		
			5)	Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi Program Kerja Tim Koordinasi SPBE	Perangkat Daerah	✓	✓	✓	✓		
G	Pemantauan dan Evaluasi SPBE										
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	1)	Pendampingan dan sosialisasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Tim Koordinasi SPBE				✓		
			2)	Penilaian Mandiri		✓	✓	✓	✓		
			3)	Penilaian Dokumen		✓	✓	✓	✓		
			4)	Interviu		✓	✓	✓	✓		
			5)	Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Bengkalis		✓	✓	✓	✓		
A	Penerapan Manajemen Risiko SPBE					1	2	3	4	5	6
	Penatalaksanaan dan pengawasan e-Government	1)	Penyusunan dokumen pedoman manajemen risiko SPBE yang berisi kerangka manajemen risiko SPBE, proses manajemen risiko SPBE, struktur			Tim Koordinasi SPBE				✓	✓

B	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi					1	2	3	4	5	6
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1)	Penyusunan dokumen pedoman Keamanan Informasi	Diskominfo			✓	X	X	X	X
		2)	Penyusunan dokumen perencanaan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi yang memuat program kerja berdasarkan kategori risiko SPBE dan target realisasinya	Diskominfo			✓	X	X	X	X
		3)	Penetapan ruang lingkup keamanan informasi	Diskominfo			✓	X	X	X	X
		4)	Penetapan penanggung jawab keamanan informasi	Diskominfo			✓	X	X	X	X
		5)	Dukungan pengoperasian keamanan informasi	Diskominfo			✓	✓	✓	✓	✓
		6)	Pelaksanaan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi meliputi area Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, serta Data dan Informasi SPBE	Perangkat Daerah			✓	✓	✓	✓	✓
		7)	Pelaksanaan program kerja SPBE: menginventarisasi seluruh aset SPBE (data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur), pelaksanaan identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE, mengukur tingkat keamanan risiko SPBE oleh unit kerja dengan berpedoman pada dokumen perencanaan keamanan SPBE yang disusun	Diskominfo			✓	✓	✓	✓	✓
		8)	Penyusunan standar teknis dan SOP keamanan SPBE	Diskominfo			✓	X	X	X	X
		9)	Reviu dan Evaluasi Kinerja Keamanan Informasi	Diskominfo			✓	✓	✓	✓	✓

			10)	Perbaikan Berkelanjutan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	Perangkat Daerah		✓	✓	✓	✓	✓	✓
			11)	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE	Diskominfotik		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	C	Penerapan Manajemen Data				1	2	3	4	5	6	
			1)	Penyusunan dokumen pedoman manajemen data	Tim Koordinasi SPBE		✓	X	X	X	X	X
			2)	Perencanaan Penerapan Manajemen Data			✓	✓	✓	✓	✓	✓
			3)	Pelaksanaan Penerapan Manajemen Data			✓	✓	✓	✓	✓	✓
				- Penyusunan Arsitektur Data	Perangkat Daerah		✓	✓	✓	✓	✓	✓
				- Pengelolaan Arsitektur Data			✓	✓	✓	✓	✓	✓
				- Pengelolaan Data Induk dan Data Referensi meliputi perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan, dan pembaruan			✓	✓	✓	✓	✓	✓
				- Pengelolaan Basis Data			✓	✓	✓	✓	✓	✓
				- Pengelolaan Kualitas Data meliputi daftar data, data prioritas dan jadwal pemutakhiran data			✓	✓	✓	✓	✓	✓
				- Pengelolaan Interoperabilitas Data	Diskominfotik		✓	✓	✓	✓	✓	✓
			4)	Penyimpanan data pada pusat data nasional			✓	✓	✓	✓	✓	✓
			5)	Penyelenggaraan forum data	Diskominfotik		✓	✓	✓	✓	✓	✓

			6)	Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Data	Diskominfotik		✓	✓	✓	✓	✓	✓
			7)	Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Data	Perangkat Daerah		✓	✓	✓	✓	✓	✓
			8)	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi Manajemen Data	Tim Koordinasi SPBE		✓	✓	✓	✓	✓	✓
D			Penerapan Manajemen Aset TIK			1	2	3	4	5	6	
			1)	Penyusunan dokumen pedoman manajemen Aset TIK	Tim Koordinasi SPBE		✓	X	X	X	X	X
			2)	Perencanaan Penerapan Manajemen Aset TIK			✓	✓	✓	✓	✓	✓
			3)	Pelaksanaan Penerapan Manajemen Aset TIK			✓	✓	✓	✓	✓	✓
				- Perencanaan Aset TIK	Perangkat Daerah		✓	✓	✓	✓	✓	✓
				- Pengadaan Aset TIK			✓	✓	✓	✓	✓	✓
				- Pengelolaan Aset TIK			✓	✓	✓	✓	✓	✓
				- Penghapusan Aset TIK			✓	✓	✓	✓	✓	✓
			4)	Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Aset TIK	BPKAD		✓	✓	✓	✓	✓	✓
			5)	Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Aset TIK	Perangkat Daerah		✓	✓	✓	✓	✓	✓
			6)	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi Aset TIK	Tim Koordinasi SPBE		✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Penatalaksanaan dan pengawasan e-Government									

	E	Penerapan Manajemen SDM					1	2	3	4	5	6																
		Penerapan Manajemen SDM	1) Penyusunan dokumen pedoman manajemen SDM SPBE	Tim Koordinasi SPBE	✓	X	X	X	X	X	X	X																
													2) Perencanaan Penerapan Manajemen SDM SPBE	BKPP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
																						3) Pelaksanaan Penerapan Manajemen SDM SPBE	BKPP	✓	✓	✓	✓	✓
													- Perencanaan SDM SPBE	BKPP	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
																					- Pengadaan SDM SPBE							
													- Pendayagunaan SDM SPBE	Bagian Organisasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
			- Pengembangan Kompetensi SDM SPBE	BKPP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
			- Pembinaan SDM SPBE	BKPP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
			4) Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen SDM SPBE	BKPP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
		5) Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen SDM SPBE	Perangkat Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																		
		6) Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi SDM SPBE	Tim Koordinasi SPBE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																		
	F	Penerapan Manajemen Pengetahuan					1	2	3	4	5	6																
		Penerapan Manajemen Pengetahuan	1) Penyusunan dokumen pedoman manajemen pengetahuan	Tim Koordinasi SPBE	✓	X	X	X	X	X	X	X																
													2) Perencanaan Penerapan Manajemen Pengetahuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							

		8)	Optimalisasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa			✓	✓	✓	✓	✓	✓
		9)	Pendayagunaan Layanan Kepegawaian	BKPP	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		10)	Optimalisasi Layanan Kepegawaian			✓	✓	✓	✓	✓	✓
		11)	Pendayagunaan Layanan Kearsipan Dinamis	Dispersip	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		12)	Optimalisasi Layanan Kearsipan Dinamis			✓	✓	✓	✓	✓	✓
		13)	Pendayagunaan Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		14)	Optimalisasi Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah			✓	✓	✓	✓	✓	✓
		15)	Pendayagunaan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	Inspektorat	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		16)	Optimalisasi Layanan Pengawasan Internal Pemerintah			✓	✓	✓	✓	✓	✓
		17)	Pendayagunaan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Bagian Organisasi	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		18)	Optimalisasi Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi			✓	✓	✓	✓	✓	✓
		19)	Pendayagunaan Layanan Kinerja Pegawai	BKPP	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		20)	Optimalisasi Layanan Kinerja Pegawai			✓	✓	✓	✓	✓	✓
B	Layanan Publik Berbasis Elektronik				4,50	4,55	4,60	4,65	4,70	4,75	
		1)	Pendayagunaan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	Diskominfotik	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓

			2)	Pendayagunaan Layanan Data Terbuka			✓	✓	✓	✓	✓	✓
			3)	Optimalisasi Layanan CCTV			✓	✓	✓	✓	✓	✓
			4)	Optimalisasi Layanan free WiFi			✓	✓	✓	✓	✓	✓
			5)	Pendayagunaan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)			✓	✓	✓	✓	✓	✓
			6)	Optimalisasi Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)		4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			7)	Pendayagunaan Layanan Publik Sektoral Tematik			✓	✓	✓	✓	✓	✓
			8)	Optimalisasi Layanan Publik Sektoral Tematik			✓	✓	✓	✓	✓	✓
A	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi					1	2	3	4	5	6	
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1)	Penyusunan dan penetapan tata kelola pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE yang terpadu dan terkendali oleh Perangkat Daerah yang menangani fungsi TIK (Standar teknis, SOP, dan SLA)				✓	✓	✓	✓	✓	
		2)	Koordinasi dan konsultasi pembangunan/ pengembangan aplikasi				✓	✓	✓	✓	✓	
		3)	Penerapan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE				✓	✓	✓	✓	✓	
			- Kajian kebutuhan pembangunan/ pengembangan aplikasi				✓	✓	✓	✓	✓	
			- Perencanaan pembangunan/ pengembangan aplikasi				✓	✓	✓	✓	✓	

	B	Layanan Jaringan Intra		1	2	3	4	5	6
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah / Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1) Koordinasi internal penyediaan layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah						
			2) Penyusunan dan penetapan tata kelola layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Standar teknis, SOP, dan SLA)		✓	X	X	✓	✓
			3) Penerapan dan pengelolaan layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah		✓	✓	✓	✓	✓
			4) Interkoneksi Layanan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi dengan Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten		✓	✓	✓	✓	✓
			5) Reviu dan Evaluasi layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah		✓	✓	✓	✓	✓
			6) Optimalisasi layanan Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi		✓	✓	✓	✓	✓
	C	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten		1	2	3	4	5	6
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	1) Koordinasi internal penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		✓	✓	X	X	X
			2) Penyusunan dan penetapan tata kelola Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten (Standar teknis, SOP, dan SLA)		✓	✓	✓	✓	✓
			3) Penerapan dan pengelolaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten		✓	✓	✓	✓	✓
			4) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang telah terintegrasi dengan dengan Sistem Penghubung Layanan IPPD lainnya dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		✓	✓	✓	✓	✓

BAB IV PENUTUP

Dokumen Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Bengkalis 2025-2029 memuat analisis dan rencana penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Tahapan rencana strategis penyelenggaraan SPBE meliputi tahapan perencanaan, pengembangan dan penguatan dalam aspek Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Aplikasi, Infrastruktur, Keamanan, dan Audit TIK. Dokumen Peta Rencana ini merupakan dokumen yang dinamis dan fleksibel (living document) sehingga dimungkinkan adanya perubahan dan reviu dokumen yang dilakukan secara periodik untuk menjaga aktualitas dokumen. Peta Rencana SPBE ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola SPBE menjadi lebih efektif dan efisien, oleh karena itu diperlukan komitmen tinggi untuk merealisasikan program dan kegiatan penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang sesuai dengan perencanaan sebagaimana tertuang dalam dokumen Peta Rencana SPBE ini.

